

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Prof. Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya.

Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi *riil* melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Ada empat faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu 1) Tanah dan kekayaan alam lainnya (SDA), 2) Barang-barang modal dan tingkat teknologi yang mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dengan kemajuan teknologi, 3) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja, pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, 4) Sistem sosial dan masyarakat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, seperti sikap berhemat yang bertujuan untuk melakukan investasi, sikap bekerja keras dsb. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi neo klasik yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja serta perubahan teknologi sebagai unsur baru.

Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sementara itu dalam analisis makro dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional *riil* yang dicapai. Terdapat 4 komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian yaitu : *konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi), dan export netto* (ekspor dikurangi impor).

Pengukuran dalam perekonomian di suatu negara adalah produk domestik bruto (PDB). PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB berdasarkan harga konstan (PDB *Rill*) Sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan *rill* yang terjadi karena adanya penambahan produksi (Mankiw : 2007).

Nilai PRDB Provinsi Lampung pada periode studi mengalami fluktuasi dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi lain di pulau Sumatera. Hal ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat sumber daya alam dan prasarana penunjang relatif sama dengan provinsi lain. Bahkan Provinsi Lampung dinilai memiliki arti strategis tersendiri sebagai kota penghubung antar pulau. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti turunnya kesejahteraan ekonomi. Disisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian.

Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Kegagalan pasar mendorong pemerintah untuk lebih jauh masuk dalam pasar dan melakukan intervensi. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan menjamin keadilan dalam berusaha. Peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu: (1) peran alokasi (2) peran distribusi, dan (3) peran stabilisasi, (Musgrave : 1993).

Bentuk intervensi atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian terkait dengan peran alokasi, dimana pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan barang publik. Hal ini terjadi karena mekanisme pasar tidak akan berminat menyediakannya. Konsekuensi dari peran alokasi pemerintah adalah ketersediaan anggaran yang pada akhirnya berwujud pada pengeluaran pemerintah. Pentingnya campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagi daerah yang ada, (Arsyad : 2005).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2007-2013 mengalami pertumbuhan yang positif. Terjadi peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya. Pencapaian hasil-hasil pembangunan sangat dirasakan masyarakat merupakan *agregat* pembangunan dari 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang tidak terlepas dari usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat. Seperti yang terlihat pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2009-2013 Provinsi Jambi memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 8 %. Sementara itu Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan rata-rata hanya sebesar

5,89 % dan pada tahun 2012 laju pertumbuhan provinsi Lampung tertinggi selama periode 2007-2013, yaitu sebesar 6,48 % atau mengalami kenaikan 0,09 % dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 kembali mengalami penurunan sebesar 5.97 % atau sebesar 0.51 % dari tahun sebelumnya.

**Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi se-Sumatera Tahun 2007-2013**

(Dalam Persen)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1, Aceh	-2.36	-5.24	-5,51	2,79	5,02	5,2	4.18
2, Sumatera Utara	6.90	6.39	5,07	6,35	6,58	6,22	6.01
3, Sumatera Barat	6.34	6.88	4,28	5,93	6,22	6,35	6.18
4, Riau	3.41	5.65	2,97	4,18	5,01	3,55	2.61
5, Jambi	6.82	7.16	6,39	7,35	8,54	7,44	7.88
6, Sumatera Selatan	5.84	5.07	4,11	5,63	6,5	6,01	5.98
7, Bengkulu	6.46	5.75	6,43	6,06	6,4	6,61	6.21
<b>8, Lampung</b>	<b>5.94</b>	<b>5.35</b>	<b>5,26</b>	<b>5,85</b>	<b>6,39</b>	<b>6,48</b>	<b>5.97</b>
9, Bangka Belitung	4.54	4.60	3,74	5,93	6,4	5,72	5.29
10, Kepulauan Riau	7.01	6.63	3,52	7,19	6,67	8,21	6.13

Sumber : Lampung Dalam Angka 2007-2013, Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan PDRB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga tidak terlepas dari peran pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah menjadi subjek penting untuk dianalisis. Secara umum gambaran pengeluaran publik, yaitu infrastruktur fisik atau *human capital* , dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi pengeluaran dapat pula memperlambat pertumbuhan perekonomian suatu daerah, (Sodik : 2007).

Dalam perekonomian modern, Pemerintah sebagai pelaku ekonomi memiliki peranan penting dalam mengatur, mengawasi perekonomian, pemerintah juga mampu melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh

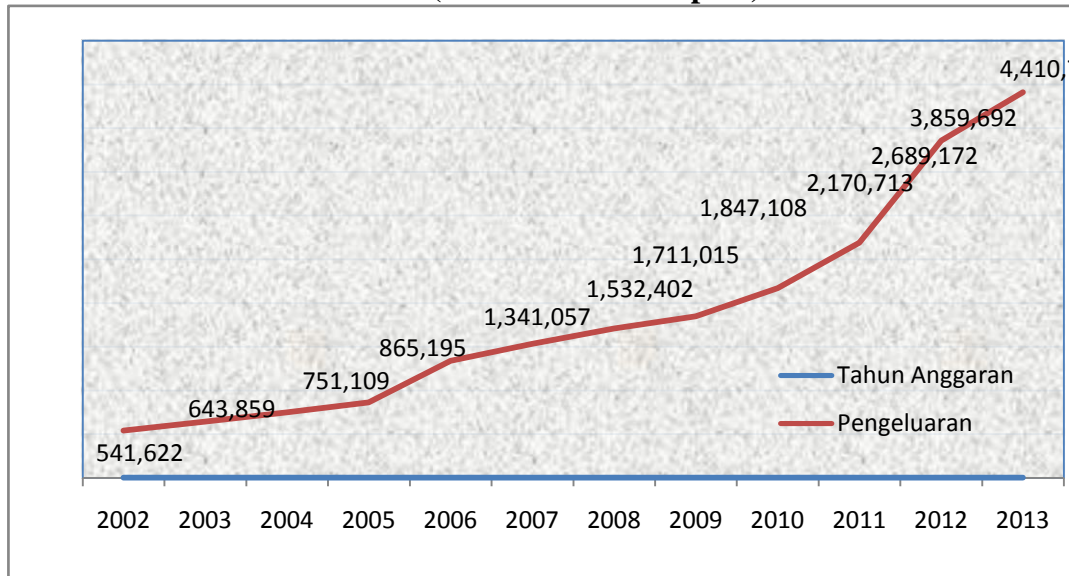
pelaku ekonomi lainnya baik swasta maupun rumah tangga, (Hidayat : 2010). Untuk itulah diperlukan campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam satu perekonomian dan hanya untuk kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sukirno (2013), Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat Keynes bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

Menurut Guritno (1999), Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung dapat di lihat pada Gambar 1 berikut

ini.

**Gambar 1. Grafik Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2002-2013 (Dalam Ribuan Rupiah)**



Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Data Diolah)

Dari grafik yang disajikan terlihat bahwa Pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Total pengeluaran tertinggi jelas terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4.410.729.851 seiring dengan semakin meningkatnya belanja daerah Provinsi Lampung dari tahun ketahun. Terkait dengan adanya kebijakan fiskal pemerintah yaitu otonomi daerah, maka baik penerimaan serta pengeluaran lebih dapat dioptimalkan dikarenakan tiap-tiap daerah dapat mengelola sumber daya yang ada. Menurut Permendagri 13 tahun 2006, Pengeluaran pemerintah daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dimana Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh

pengeluaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah.

Otonomi daerah di Indonesia mulai dijalankan pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan berlandaskan UU No. 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi pemerintah pusat dan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Secara terinci pengeluaran pemerintah tersebut terbagi atas 3 pos besar yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung/*indirect expenditure* (sebelum tahun 2004 dikatakan sebagai Belanja Aparatur Daerah). Belanja Tidak Langsung tersebut terdiri dari beberapa pos yaitu Belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan, belanja bagi hasil, belanja bantuan, serta pengeluaran tidak terduga).

2. Belanja Langsung /*Direct Expenditure* (sebelum tahun 2004 dikatakan sebagai Belanja Pelayanan). Belanja Langsung tersebut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

3. Pembiayaan Daerah/ *Local Government Financing*.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan meliputi:

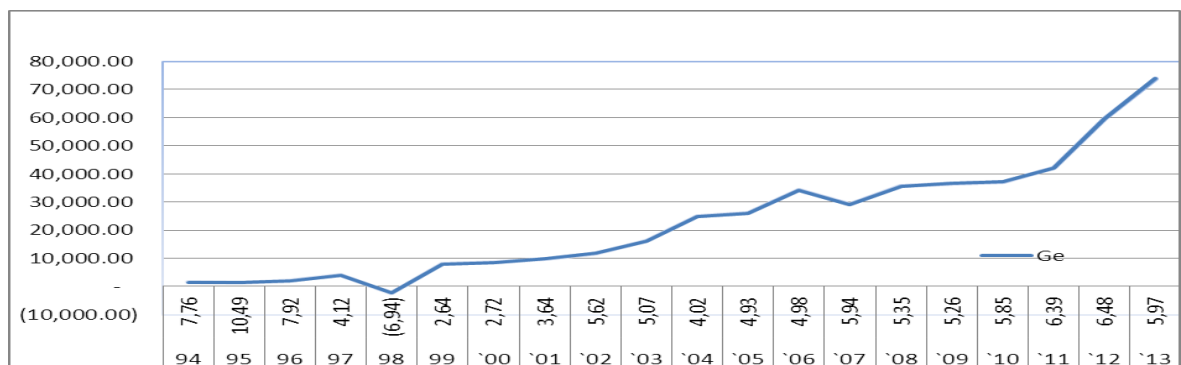
- Pembentukan dana cadangan;
- Penyertaan modal pemerintah daerah;
- Pembayaran pokok utang; dan



-Pemberian pinjaman.

Pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan perbandingan pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi Tahun 1994 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Data Diolah).

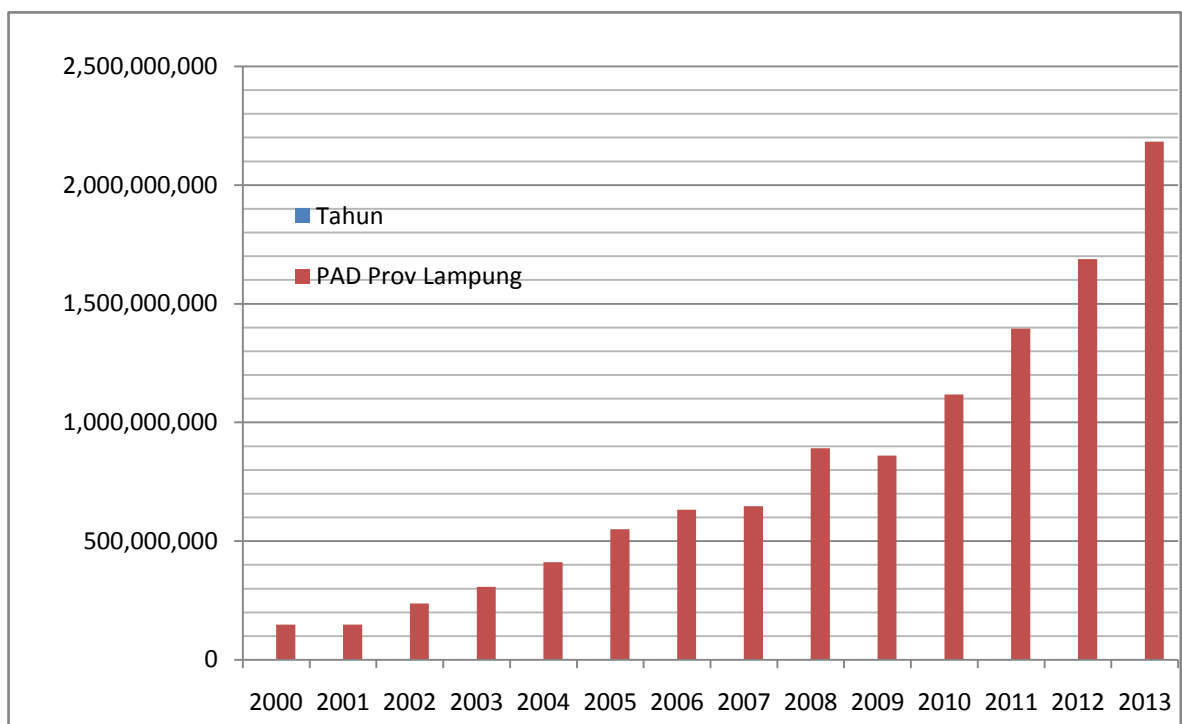
**Gambar 2. Grafik Perbandingan Total Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1994-2013**

Pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari

polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemerintah daerah melalui upaya memenuhi kewajiban daerah salah satu tujuannya adalah meningkatkan perekonomian yang diharapkan secara langsung akan berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut pemerintah diharapkan dapat mempunyai sistem keuangan sendiri baik sisi pendapatan maupun pengeluaran sehingga tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Pada gambar 3 akan dijelaskan bagaimana gambaran realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima di Provinsi Lampung Tahun 2000-2013.

**Gambar 3. Grafik Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000-2013**  
(Dalam Ribuan Rupiah)



Sumber : DJPK (2000-2013)

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya meskipun peningkatan PAD tersebut dinilai tidak signifikan. Nilai PAD

terbesar diperoleh pada tahun 2013 sebesar 2,183,413,479.000 dan mengalami peningkatan yang relatif signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Musgrave (1993), berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

Pertumbuhan ekonomi, sangat dipengaruhi dengan keunggulan dan kemajuan perekonomian yang terjadi karena iklim penanaman modal yang memiliki daya saing. Artinya, iklim penanaman modal tersebut akan mampu mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif (*comparative advantages*) - yang umumnya diwarisi (*endowed*) - menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantages*), yang diciptakan (*created/developed*) Sodik (2007). Hanya dengan pola inilah peningkatan daya saing perekonomian terjadi secara berkelanjutan baik secara nasional maupun dalam lingkup daerah. Oleh karena itu penanaman modal merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi. Selanjutnya, melalui proses penggandaan (*multiplier effect*) aktivitas tersebut akan menghasilkan tambahan keluaran (*output*) yang berarti akan meningkatkan pendapatan daerah dan nasional.

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (*asing*). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari besarnya belanja modal atau selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja langsung.

Tabel 2 menggambarkan realisasi investasi Provinsi Lampung Tahun 2002-2013, yang mengalami perkembangan fluktuatif, dengan kata lain kita dapat melihat perkembangan investasi dari perusahaan- perusahaan baik swasta maupun pemerintah yang menanamkan sahamnya di Provinsi Lampung terhadap realisasi investasi pemerintah tersebut dapat diukur melalui besaran pengeluaran pemerintah di sisi belanja modal. Jika investasi Pemerintah naik, maka belanja modal di daerah tersebut mengalami kenaikan, sehingga dapat meningkatkan faktor-faktor produksi.

**Tabel 2 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2000-2013 (Dalam Rupiah)**

TAHUN	REALISASI INVESTASI SWASTA			INVESTASI PEMERINTAH
	PMA	PMDN	TOTAL	
2000	9,923,130,940	3,823,126,605	13,746,257,545	3,798,716,000
2001	8,673,356,789	7,935,071,593	16,608,428,382	45,039,610,000
2002	43,201,285,380	56,300,952,920	99,502,238,300	61,734,000,000
2003	10,547,874,596	9,125,919,808	19,673,794,404	184,074,602,000
2004	102,340,821,934	118,345,643,900	220,686,465,834	75,394,392,000
2005	81,301,221,404	103,454,563,300	184,755,784,704	174,393,394,000
2006	80,246,199,809	83,780,225,000	164,026,424,809	326,507,852,000
2007	410,934,653,608	869,238,500,128	1,280,173,153,736	269,809,535,000
2008	598,952,479,720	806,789,245,000	1,405,741,724,720	205,477,765,000
2009	333,534,860,000	532,186,140,000	865,721,000,000	233,290,049,000
2010	294,301,589,790	254,320,146,000	548,621,735,790	425,809,200,000
2011	800,620,160,000	739,286,140,000	1,539,906,300,000	631,250,022,000
2012	565,199,871,000	802,208,900,000	1,367,408,771,000	831,950,660,000
2013	705,927,166,088	1,205,248,752,146	1,911,175,918,234	970,167,299,000

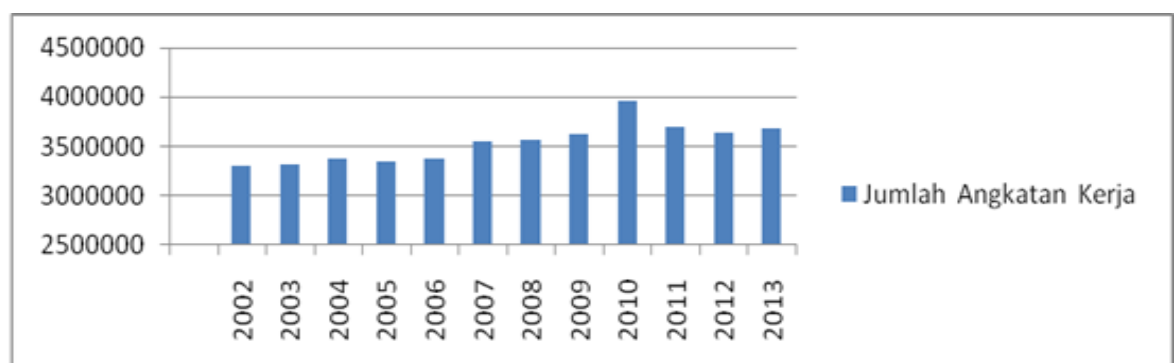
Sumber : BPMP Provinsi Lampung dan [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)

Agar besarnya investasi dan penanaman modal yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai, peran pemerintah daerah sangat penting terutama dalam menciptakan daya saing dan iklim investasi yang kondusif di daerah serta memberikan informasi arahan kebijakan penanaman modal sehingga memberikan daya tarik yang tinggi kepada investor untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya di Provinsi Lampung. Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa pengeluaran pemerintah untuk belanja modal (Realisasi Investasi Pemerintah) masih lebih kecil terhadap Total Penerimaan Realisasi Investasi Swasta. Sehingga hal ini berarti secara tidak langsung, Pemerintah Provinsi Lampung masih sangat bergantung terhadap peran swasta dalam pembangunan.

Penanaman modal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, bahkan rendah tingginya kualitas kegiatan penanaman modal di dalam suatu perekonomian akan sangat tergantung dari daya saing iklim penanaman modal perekonomian tersebut.

Selain investasi, tenaga kerja merupakan faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh (Todaro:2013). Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki *skill* akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah. Gambaran kondisi Angkatan Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2002-2013 dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

**Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Angkatan Kerja Provinsi Lampung Tahun 2002-2013 (Orang)**

Penduduk usia kerja ini cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, Jumlah angkatan kerja yang bekerja tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebanyak 3.957.697 orang dimana sebanyak 3.737.078 yang bekerja dan 220.619 orang yang tidak bekerja, dengan persentase total bekerja terhadap angkatan kerja sebanyak 94,43 %. Pada tahun pengamatan terakhir (2013) jumlah penduduk usia produktif yang bekerja di Provinsi Lampung sebanyak 3.471.602 dan sebanyak 209.482 orang merupakan penduduk usia produktif yang tidak bekerja. Persentase penduduk bekerja terhadap penduduk angkatan kerja dikenal sebagai Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Pada tahun 2013 persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang terdapat di Provinsi Lampung sebesar 94,31 %.

**Tabel 3. Angkatan Kerja Provinsi Lampung Tahun 2002-2013 (Orang)**

Tahun	Angkatan Kerja					Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka		Jumlah		
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	Angkatan Kerja	
2002	3,033,305.00	96,624.00	178,629.00	275,253.00	3,308,558.00	91.68%
2003	3,017,916.00	55,812.00	242,498.00	298,310.00	3,316,226.00	91.00%
2004	3,132,126.00	58,234.00	191,456.00	249,690.00	3,381,816.00	92.62%
2005	3,113,984.00	53,161.00	175,970.00	229,131.00	3,343,115.00	93.15%
2006	3,064,139.00	62,963.00	244,726.00	307,689.00	3,371,828.00	90.87%
2007	3,281,351.00	109,869.00	159,263.00	269,132.00	3,550,483.00	92.42%
2008	3,313,553.00	113,550.00	141,667.00	255,217.00	3,568,770.00	92.85%
2009	3,387,175.00	80,593.00	159,387.00	239,980.00	3,627,155.00	93.38%
2010	3,737,078.00	72,186.00	148,433.00	220,619.00	3,957,697.00	94.43%
2011	3,482,301.00	58,198.00	155,567.00	213,765.00	3,696,066.00	94.22%
2012	3,449,307.00	72,125.00	116,465.00	188,590.00	3,637,897.00	94.82%
2013	3,471,602.00	87,936.00	121,546.00	209,482.00	3,681,084.00	94.31%

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Indikator ini menunjukkan seberapa besar penduduk yang berpotensi secara ekonomis menghasilkan barang dan jasa secara *rill* berpartisipasi menghasilkan barang dan jasa tersebut, dengan kata lain termasuk kelompok penduduk bekerja. Jumlah Angkatan kerja terus meningkat meskipun tidak begitu signifikan dalam

lima tahun terakhir, sementara persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia bekerja yang mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan manusia di Lampung mulai mengakomodasi kepentingan percepatan ekonomi lokal.

Dari paparan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dengan memperluas fungsi ekonomi *neo klasik* diukur dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Investasi Swasta dan Realisasi pengeluaran pemerintah terhadap belanja modal (investasi pemerintah), dan kondisi tenaga kerja Provinsi Lampung dengan tahun penelitian 2000- 2013.

## **B. Rumusan Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah dengan fokus pembangunan lebih diletakkan pada daerah Kabupaten/Kota maka sangat menarik untuk mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu indikator yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu untuk mengkaji pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung dapat diamati bagaimana pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Propinsi Lampung.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah besarnya nilai pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung namun tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Dengan memperluas fungsi *neo klasik sollow* penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana Pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Pendapatan Asli Daerah terhadap



Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung Tahun 2000-2013 sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Realisasi Investasi Pemerintah (Belanja Modal) Pertenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung tahun 2000-2013?
2. Bagaimana Pengaruh Realisasi Investasi Swasta yaitu realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pertenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung tahun 2000-2013 ?
3. Bagaimana Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pertenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung tahun 2000-2013 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Investasi Pemerintah (Belanja Modal) Pertenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung tahun 2000-2013.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Realisasi Investasi Swasta yaitu realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pertenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung tahun 2000-2013.

3. Untuk Menganalisis Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pertenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung tahun 2000-2013.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran pemerintah Propinsi Lampung dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia.
2. Kegunaan teoritis bagi kalangan akademis dan dunia pendidikan yaitu untuk menambah wawasan keilmuan mengenai pertumbuhan ekonomi, bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang berminat dalam meneliti hal yang sama.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mengkaji peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dengan memperluas fungsi produksi neo klasik. Secara teoritis Tidak ada peran pemerintah dalam standar fungsi produksi neo klasik. Namun, pemerintah memainkan peran penting dalam distribusi dan alokasi sumber informasi. Selain itu, pemerintah berperan penting dalam organisasi sosial, hukum dan stabilitas

politik termasuk penyediaan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan dan pertahanan. Cooray (2009).

Penelitian menyelidiki peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dengan memperluas fungsi produksi neo klasik untuk menggabungkan dua dimensi pemerintah yaitu dimensi ukuran dan dimensi kualitas. Dimensi ukuran yang diukur melalui realisasi pengeluaran pemerintah sebagaimana yang pernah diteliti oleh dalam karya Barro (1991), Barro dan Sala-i-Martin (1992), Easterly dan Rebelo (1993), Devarajan, Swaroop dan Zou (1996), Hulton (1996), Pritchett (1996), Aschauer (2000). Sementara itu dimensi kualitas pemerintah dapat dilihat melalui bagaimana peran pemerintah dalam menyediakan barang publik dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengembangkan investasi di daerahnya termasuk masalah penyerapan tenaga kerja dalam rangka menanggulangi pengangguran. Hal ini terkait dengan model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik (*Solow Neo Classical Growth*), Teori ini menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan investasi, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu (Mankiw:2000). Dalam teori ini perkembangan teknologi diasumsikan sebagai variabel yang eksogen. Hubungan antara output, modal dan tenaga kerja dapat ditulis dalam bentuk fungsi sebagai berikut.

$$y = f(k) \dots\dots\dots(1),$$

Dari persamaan 1 terlihat bahwa output per pekerja ( $y$ ) adalah fungsi dari *capital stock* per pekerja. Sesuai dengan fungsi produksi yang berlaku hukum “*the law of diminishing return*”, dimana pada titik produksi awal, penambahan kapital per labor akan menambah output per pekerja lebih banyak, tetapi pada titik tertentu

penambahan *capital stock* per pekerja tidak akan menambah output per pekerja dan bahkan akan bisa mengurangi output per pekerja. Sedangkan fungsi investasi dituliskan sebagai berikut :

$$i = s f(k) \dots\dots\dots(2),$$

Dalam persamaan tersebut, tingkat investasi per pekerja merupakan fungsi *capital stock* per pekerja. *Capital stock* sendiri dipengaruhi oleh besarnya investasi dan penyusutan dimana investasi akan menambah *capital stock* dan penyusutan akan mengurangnya.

$$\Delta k = i - \gamma kt \dots\dots\dots(3),$$

$\gamma$  adalah porsi penyusutan terhadap *capital stock*. Tingkat tabungan yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan *capital stock* dan akan meningkatkan pendapatan sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tetapi dalam kurun waktu tertentu pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan jika telah mencapai apa yang disebut *steady-state level of capital*. Kondisi ini terjadi jika investasi sama dengan penyusutan sehingga akumulasi modal.

Selain tingkat tabungan, pertumbuhan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi lebih bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Populasi meningkatkan jumlah labor dan dengan sendirinya akan mengurangi *capital stock* per pekerja. Tingkat pertumbuhan populasi dan tingkat penyusutan secara bersama-sama akan mengurangi *capital stock*. Pengaruh pertumbuhan populasi secara matematis dapat ditulis sebagai berikut.

$$\Delta k = sf(k) - (\gamma + n) kt, \dots\dots\dots(4),$$

dimana  $n$  adalah tingkat pertumbuhan populasi. Dalam teori ini diprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi akan memiliki GDP

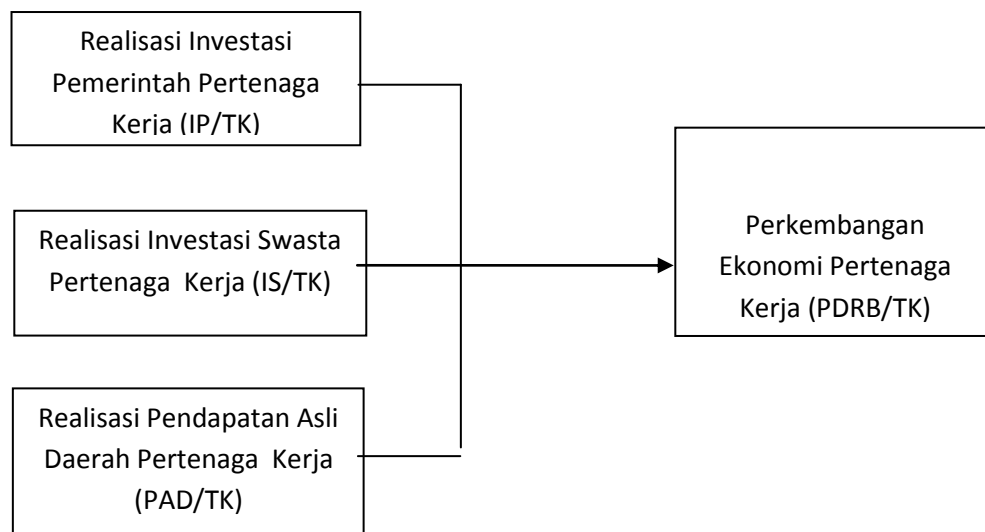
perkapita yang rendah (Mankiw : 2000). Kemajuan teknologi dalam teori Solow dianggap sebagai faktor eksogen. Dalam perumusan selanjutnya fungsi produksi adalah  $Y = f(K, L, E)$ , dimana E adalah efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya  $y$  adalah  $Y/LE$  dimana LE menunjukkan jumlah tenaga kerja efektif. Pengaruh dari kemajuan teknologi terhadap perubahan modal dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\Delta k = sf(k) - (\gamma + n + g) kt, \dots\dots\dots(5)$$

Dimana  $g$  menggambarkan kemajuan teknologi melalui efisiensi tenaga kerja. Dampak dari kemajuan teknologi adalah dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan karena mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja yang terus tumbuh. Menurut teori Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatkan porsi tabungan yang akan meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik serta mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan pendapatan per tenaga kerja yang diasumsikan oleh PAD Pertenaga kerja sehingga pemberian kesempatan untuk berinovasi pada sektor swasta akan berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi, Tamtomo (2010).

Dengan demikian berdasarkan penelitian terdahulu dan teori tersebut diatas, peneliti mencoba untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan melihat variabel investasi pemerintah (belanja modal) pertenaga kerja, investasi swasta (akumulasi modal swasta) pertenaga kerja, dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pertenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Periode 2000-2013. Secara ringkas akan diperlihatkan pada gambar berikut.

**Gambar 5 Skema Kerangka Berpikir**



## **F. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga secara bersama-sama Jumlah, Realisasi Nilai Investasi Pemerintah (Ip) Pertenaga Kerja, Realisasi nilai Investasi Swasta (Is) Pertenaga Kerja dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pertenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Perkembangan Ekonomi (PDRB) Pertenaga Kerja Provinsi Lampung tahun 2000-2013.
2. Diduga Realisasi Investasi Pemerintah Pertenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Perkembangan Ekonomi (PDRB) Pertenaga Kerja Provinsi Lampung tahun 2000-2013.

3. Diduga Realisasi Investasi Swasta Pertenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Perkembangan Ekonomi (PDRB) Pertenaga Kerja Provinsi Lampung tahun 2000-2013.
4. Diduga Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pertenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Perkembangan Ekonomi (PDRB) Pertenaga Kerja Provinsi Lampung tahun 2000-2013.

### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh Investasi pemerintah pertenaga kerja, investasi swasta pertenaga kerja dan realisasi pendapatan asli daerah pertenaga kerja terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Lampung periode Tahun 2000 hingga 2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah yang diproksi melalui realisasi belanja modal pemerintah, Investasi Swasta (Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN) dan Pendapatan Asli Daerah.